

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintahan terendah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan ataupun sebagai kesatuan hukum adat menjadi sangat penting. Sebagai lembaga pemerintahan desa merupakan kesatuan pemberian layanan kepada masyarakat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa juga merupakan sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan yang stabil dan dinamis.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal, hidup bergotong royong, adat istiadat yang sama dengan tata norma dan memiliki cara sendiri dalam mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Sejak ditetapkannya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan yang dimaksud ada di dalam pasal 1 yaitu Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari definisi desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada, kepentingan masyarakat berdasarkan upaya masyarakat setempat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi peyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan yang ada di desa. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas

mengelola wilayah ditingkat desa. Pemerintah desa adalah mereka yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa dipimpin oleh kepala desa yang posisinya sejajar dengan BPD atau Badan Penyelenggara Daerah. Keduanya merupakan puncak dari pemerintahan dimana kepala desa merupakan petugas pelaksana pemerintahan. Dibawah kepala desa terdapat Sekretaris Desa atau biasa disebut dengan sebutan Carik. Sekretaris Desa juga memegang kekuasaan terhadap bidang tata usaha yang ada dibawahnya.

Pariwisata merupakan salah satu hal penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlakukan untuk menunjang industri wisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Mata rantai kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata tersebut mampu menghasilkan devisa dan dapat pula digunakan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja.

Dengan adanya pariwisata, tentu akan mendatangkan berbagai dampak di berbagai segi antara lain dampak lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Dari segi ekonomi adanya pariwisata membawa berbagai macam dampak meliputi dampak lingkungan, dampak tidak langsung, dan dampak lanjutan. Dampak langsungnya adalah bagi pekerja di kawasan wisata tersebut termasuk pemerintah daerah. Dampak tidak langsungnya salah satunya bisa berupa meningkatnya permintaan akan transportasi umum publik. Dan dampak berkelanjutan tentu berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat yang bekerja dalam bidang pariwisata ataupun tidak secara langsung tetapi mendapatkan dampak positifnya.

Pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai lapisan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, Sehingga dalam penanganannya harus dilakukan dengan serius dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, selain itu untuk mencapai semua tujuan pengelolaan pariwisata, harus diadakan promosi agar potensi dan daya tarik wisata dapat lebih dikenal dan mampu menggerakkan calon wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati tempat wisata. Dalam hal ini industri pariwisata yang lebih bervariasi menyangkut pelestarian dari objek itu sendiri sesuai dengan tujuan pengelolaan pariwisata yaitu untuk mengenalkan keindahan alam, budaya dan adat istiadat yang beranekaragam.

Adapun peraturan bupati Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo mendukung peningkatan perkembangan kepariwisataan khususnya di wilayah pedesaan yang berbasis potensi kearifan lokal, pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata, pemberdayaan, dan pelestarian alam serta budaya yang ada di Kabupaten Ponorogo yang kemudian dilakukan penetapan sebagai desa wisata. Peran dari pemerintah desa sangatlah dibutuhkan oleh desa terhadap bagaimana cara mengembangkan potensi desa wisata.

Di Ponorogo potensi desa wisata sangatlah banyak hampir di semua desa ada seperti wisata alam, religi maupun buatan. Seperti contohnya Gunung Beruk di Desa Karangpatihan yang mampu membuat perekonomian warga masyarakatnya meningkat dari pendapatan perekonomian dan pengembangan serta pengelolaan wisata Gunung Beruk. Suatu desa wisata memiliki daya tarik yang khas.

Desa Sukorejo selama ini terkenal dengan hutan kecilnya yang bernama Sokosewu yang terletak di pinggir jalan raya Sukorejo-Ndanyang sebelah utara Kecamatan Sukorejo sekitar 1 km, dan juga terkenal angker dan dianggap keramat, namun melihat dari sejarahnya yang ada Sokosewu memiliki historis pernah menjadi tempat persinggahan dari Pangeran Diponegoro dan ribuan prajuritnya yang pada saat itu hendak bertempur. Sokosewu ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1825-1830 lalu. Sokosewu merupakan area yang ditumbuhi berbagai pohon, terutama pohon Asoka. Selain pohon Asoka juga ada Pohon Trembesi dan Pohon

Prih. Meski tidak pernah diadakan reboisasi pohon- pohon ini selalu ada yang tumbuh baru dan yang sudah tua tumbang dengan sendirinya.

Ditengah Sokosewu terdapat susunan batu bata yang menyerupai candi yang dulunya tempat peristirahatan Pangeran Diponegoro dan dipercaya warga masyarakat sekitar dulunya dipakai untuk menaruh sesaji saat ada masyarakat sekitar yang memiliki hajat. Serta juga ada Linggayon (Lingga-Yoni) seperti alu dan lumpang yang terbuat dari batu. Di ponorogo alu merupakan alat penumbuk dan lumpang sebagai wadahnya. Uniknya alu dan lumpang ini terdapat pahatan yang diyakini masyarakat sekitar sebagai jalan cerita Legenda yang ada Sokosewu. Sayangnya alu dan lumpang ini hilang di karenakan memang dahulunya Sokosewu memang tidak terawat. Akhirnya alunya hilang dan lumpangnya pecah menjadi berkeping – keping dan kepingannya pun ada dibawah pohon yang paling besar ditengan Sokosewu. Potensi desa wisata ini harus dimanfaatkan karena didalamnya memiliki nilai sejarahnya.

Awal Juli 2017 awal dimulainya perenovasian terhadap Taman Sokosewu yang ada di Desa Sukorejo untuk selanjutnya dibuatkan acara atas kerjasama Pemerintah Desa Sukorejo dengan Semua Karangtaruna Bolo Sewu yang ada di Desa Sukorejo ini. Setelah adanya acara Festival Sokosewu yang pertama mulailah para pedagang bermunculan, mulai dari warga sekitar yang ada di lokasi taman sokosewu hingga warga masyarakat lainnya yang ingin berjualan ataupun menyediakan jasa di Taman Sokosewu ini.

Pembangunan untuk serta pengembangan taman wisata Sokosewu ini dilaksanakan dengan secara gotong royong antara masyarakat desa sukorejo dengan pemerintah desa. Dengan adanya Taman Sokosewu ini warga masyarakat Desa Sukorejo telah memiliki tempat ataupun lapak untuk berjualan di sekitar taman. Tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Dengan berbagai sektor yang terus dikembangkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Di masyarakat pedesaan sumber daya manusianya masih menengah kebawah, karena terpengaruh dengan Pendidikan yang masih rendah dan penyerapan toknologi yang masih belum merata.

Berdasarkan dari realita diatas maka peneliti ingin membuat skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Sukorejo Dalam Pengembangan Taman Wisata Sokosewu.”

1.2 . Rumusan Masalah

Bedasarkan Latar belakang diatas dan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana peran pemerintah Desa Sukorejo dalam pengembangan taman wisata Sokosewu?
- 1.2.2 Apa saja faktor penghambat dan pendukung bagi pemerintah Desa sukorejo dalam pengembangan Taman Sokosewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti ini bertujuan untuk :

- 1.3.1 Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan taman wisata Sokosewu
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor penghambat serta faktor pendukung apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Desa Sukorejo dalam pengembangan taman wisata Sokosewu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan peneliti sebagai kajian dengan berhubungan strategi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membangun sikap social dalam implementasikan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan studi ilmiah serta acuan bagi peneliti selanjutnya

c. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Hasil penelitian ini memberi manfaat dan dapat memberikan suatu wawasan untuk menjelaskan peran pemerintah desa dalam pengembangan taman Wisata Sukosewu.
- 2) Memperkaya literasi dalam proses pembelajaran

b. Pihak lain

- 1) Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa berkaitan dengan perannya dalam pengembangan objek wisata Taman Sukosewu.
- 2) peran pemerintah desa dalam perkembangan taman wisata serta memberi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat



